



Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung C Pulau Cempala Lt. I

LAPORAN RENJA



TAHUN 2026

Kata Pengantar

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja Renja) Disperindagkopum Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan untuk 1 (satu) Tahun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Disperindagkopum dan bersifat Indikatif. Rencana Kerja (Renja) Disperindagkopum Kabupaten Natuna Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Disperindagkopum Kabupaten Natuna Tahun 2026, adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Renja Disperindagkopum merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Disperindagkopum dalam satu Tahun Anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Disperindagkopum Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NATUNA,

MARWAN SJAH PUTRA, S.TP
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700901 200203 1 015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna. Kemudian terjadi Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset/barang persediaan dan program kerja dinas;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, penerbitan usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian KSP/USP, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Mengkoordinasikan rencana kerja perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro dengan instansi teknis terkait;
7. Mengkoordinasikan promosi peluang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
8. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro dengan instansi teknis terkait;
9. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
10. Menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkup dinas;

11. Menetapkan fasilitasi pendaftaran dan perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
12. Menetapkan penerapan standar, peningkatan mutu ,perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sertifikasi barang dan jasa;
13. Menetapkan pembinaan dan pengawasan UPT
14. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kedudukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna merupakan Dinas sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan peindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kepulauan Riau.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tentang pembentukan tim penyusun Renja;
 - 2) Orientasi mengenai Renja;
 - 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
 - 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan OPD.
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi :
- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
 - 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Masyarakat dibahas,

sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026. Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61);
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 30);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA TULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2026

Bab IV Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 13.504.985.010,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.330.538.011,- atau sebesar 76,49%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

a. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

c. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

d. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Penyusunan basis data usaha mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

e. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi

f. **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
 - Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten / kota
 - Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya

g. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

h. **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota
 -

3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

i. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pameran Dagang Nasional

j. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota

k. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

l. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Penyusunan rencana pembangunan industri kab/kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

m. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui SIINAS yang terintegrasi dengan OSS RBA

o. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui SIINAS

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIMULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro																												
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2023 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024			
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=8+12	15=14/5x100													
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2.17.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																										
2.17.03.		PROGRAM PENGUSAHAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Persen	15.83	76,000,000	0	15.83	140,000,000	15.83	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.17.03.2.01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi berdasarkan kualitas RAT, volume usaha dan aset	Persen	10.84	76,000,000	0	10.84	140,000,000	10.84	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.17.03.2.01.03.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	26	76,000,000	0	26	140,000,000	26	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.17.04.		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	29.51	156,000,000	59.04	156,302,822	29.51	178,000,000	29.51	104,604,000	0	28,195,400	66.67	65,802,100	66.67	2,615,100	66.67	3,660,400	67	100,233,000	225.92	95.82	129.71	156,302,822	425.99	104.20
2.17.04.2.01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	Koperasi	2	156,000,000	2	156,302,822	2	178,000,000	2	104,604,000	0	28,195,400	0	65,802,100	5	2,615,100	5	3,660,400	10	100,233,000	500.00	95.82	12	156,302,822	600.00	104.20
2.17.04.2.01.01.		Penilaian Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	156,000,000	41	156,302,822	10	178,000,000	10	104,604,000	0	28,195,400	24	65,802,100	24	2,615,100	24	3,660,400	24	100,233,000	240.00	91.82	65	156,302,822	550.00	104.20
2.17.05.		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Persen	0	200,000,000	0	309,358,153	0	178,000,000	0	364,740,000	0	14,593,000	0	16,600,000	29.24	17,035,200	29.24	121,128,953	58	309,358,153	0.00	84.82	98.48	309,358,153	0.00	154.88
2.17.05.2.01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	Koperasi	20	200,000,000	0	309,358,153	20	178,000,000	20	364,740,000	0	14,593,000	0	16,600,000	23	17,035,200	20	121,128,953	53	309,358,153	265.00	84.82	53	309,358,153	265.00	154.88
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapabilitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	20	200,000,000	0	309,358,153	20	178,000,000	20	364,740,000	0	14,593,000	0	16,600,000	50	157,035,200	60	121,128,953	140	309,358,153	700.00	84.82	140	309,358,153	700.00	154.88
2.17.06.		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLUNDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	16.88	200,000,000	0	16.88	200,000,000	16.88	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.17.06.2.01.		Pemerdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	Koperasi	4	200,000,000	0	4	200,000,000	4	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.17.06.2.01.09.		Pemerdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	4	200,000,000	0	4	200,000,000	4	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.17.07.		PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wiraswasta	Persen	5.68	1,135,750,000	14.78	1,135,252,904	5.68	1,100,000,000	5.68	390,324,000	0	35,923,100	10.61	241,609,746	10.61	63,743,000	0	109,234,300	11	454,506,746	186.80	115.44	26.30	1,135,252,904	447.01	96.40
2.17.07.2.01.		Pemerdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang dilindungi dalam sistem data online (SDS)	UMKM	3094	1,135,750,000	10473	1,135,252,904	3094	1,100,000,000	3094	390,324,000	0	35,923,100	3.813	241,609,746	3.813	63,743,000	0	109,234,300	4	454,506,746	0.12	115.44	10476.813	1,135,252,904	338.62	96.40
2.17.07.2.01.02.		Pemerdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	2	581,750,000	0	2	500,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2023 s/d 2028 (periode renstra PD)				Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023				Realisasi Kinerja pada Tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang direvisasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		i
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=9+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp CPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	200.000.000	46	564.705,537	2	200.000.000	2	8.830.000	0	10.961.550	0	18.153.748	8	29.808.500	30	54.617.150	38	222.333.948	19.0000	2.530.75	84	564.705,537	4200.00	282.35	Unit Jur mal me per mc pro der dis
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	200.000.000	46	564.705,537	2	200.000.000	2	367.680.000	0	10.961.550	0	18.153.748	8	29.808.500	30	54.617.150	38	222.333.948	19.0000	60.47	84	564.705,537	4200.00	282.35	Unit Jur mal me per mc pro der dis
2.17.07.2.01.14.		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1	200.000.000	0	9.841,850	1	200.000.000	1	11.824.000	0	0	695.4	5.320.850	5109	4.540.000	5109	0	6.954	9.848.850	696.400.00	7.19	6964	9.841,850	696.400.00	4.92	
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen	48.78	489.000.000	0	718.544.900	48.78	340.000.000	48.78	953.336.000	0	23.219.000	15.66	308.156.400	15.66	242.880.500	23.81	145.309.000	16	718.544.900	32.12	75.48	15.66	718.544.900	3212	156.42	
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	UMKM	276	489.000.000	0	718.544.900	276	340.000.000	276	953.336.000	0	23.219.000	131	308.156.400	131	242.880.500	512	145.309.000	131	718.544.900	47.46	75.48	131	718.544.900	47.46	156.42	
2.17.08.2.01.06.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230.000.000	0	359.772.450	3	170.000.000	3	315.300.000	0	11.509.500	45	15.4078.200	45	121.430.250	161	72.854.500	45	359.772.450	1500.00	106.98	45	359.772.450	1500.00	156.42	Ma pro ust yai fas
2.17.08.2.01.08.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230.000.000	0	359.772.450	3	170.000.000	3	317.036.000	0	11.509.500	45	15.4078.200	45	121.430.250	161	72.854.500	45	359.772.450	1500.00	98.31	45	359.772.450	1500.00	156.42	Ma pro ust yai fas
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																												
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Mempersiapkan izin	Persen	2.30	310.000.000	80.44	41.812.772	2.30	180.000.000	2.30	38.050.000	3.01	200.000	3.01	16.895.701	8.32	6.400.281	8.32	4.685.420	3	27.183.372	130.87	88.81	83.45	41.812.772	2.768.76	13.49	
3.30.02.2.01.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Persen	13.32	30.000.000	0	9.471.486	13.32	30.000.000	13.32	11.000.000	0	200.000	0	5.268.800	0	249.999	11.54	3.751.667	74	9.471.486	956.98	86.10	74.19	9.471.486	956.98	31.57	
3.30.02.2.01.01.	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perokhan Peraturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Kebutuhan Perokhan Peraturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	30.000.000	0	8.471.486	3	30.000.000	3	11.000.000	0	200.000	0	5.269.800	0	249.999	3	3.751.667	3	9.471.465	100.00	86.10	3	9.471.465	100.00	31.57	Rek por ust yai per swa
3.30.02.2.02.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Penerbitan TDG	Persen	81	100.000.000	168.66	31.507.551	81	20.000.000	81	24.000.000	0	0	27.11	10.327.901	27.11	5.775.249	50	775.001	27	16.878.181	33.47	70.33	193.77	31.507.551	238.22	31.51	
3.30.02.2.02.01.	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	100.000.000	4	31.507.551	1	20.000.000	1	24.000.000	0	0	0	10.327.901	0	5.775.249	1	775.001	1	16.878.181	100.00	70.33	5	31.507.551	500.00	31.51	Rek por Der
3.30.02.2.06.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengedar dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	Pelaku Usaha	3	50.000.000	0	3	50.000.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
3.30.02.2.05.01.	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengedar dan Penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	50.000.000	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja PD pada Tahun 2023 s/d 2026 (periode rencana PD)		Realisasi capaian kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direvisi/realisasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja PD yang direvisi/realisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang direvisi/realisasi (%)		Realisasi Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2024		i		
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=9+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp CPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp
3.30.02.2.06.		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin	Pelaku Usaha	3	130.000.000	0	833.765	3	50.000.000	3	4.050.000	0	0	0	300.000	115	375.003	115	158.752	230	833.765	7.886.67	20.89	230	833.765	7.886.67	0.64	
3.30.02.2.06.01.		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	2	30.000.000	0	833.765	2	30.000.000	2	4.050.000	0	0	0	300.000	0	375.003	1	158.752	1	833.765	50.00	20.59	1	833.765	50.00	2.78	Rec po- Dit
3.30.02.2.06.03.		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-02) maupun Produsen B2 (P-02)	Jumlah laporan hasil pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-02) maupun Produsen B2 (P-02)	Laporan	1	100.000.000	0	1	20.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.03.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	20.45	2.100.000.000	77.27	5.622.434.672	20.45	9.144.000.000	20.45	758.150.000	40.91	1.685.620	40.91	16.236.960	36	4.856.954	36	3.991.417	41	26.772.961	200.05	3.93	118.18	5.622.434.672	677.80	224.90	
3.30.03.2.01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	Gedung	1	2.500.000.000	3	5.622.434.672	1	9.144.000.000	1	758.150.000	1	1.685.620	1	16.236.960	1	4.856.954	0	3.991.417	1	26.772.961	100.00	3.93	4	5.622.434.672	400.00	224.90	
3.30.03.2.01.01.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	2.500.000.000	2	5.622.434.672	1	9.144.000.000	1	758.150.000	1	1.685.620	1	16.236.960	1	4.856.954	0	3.991.417	1	26.772.961	100.00	3.93	3	5.622.434.672	300.00	224.90	Sur- dit
3.30.04.		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Keefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.06	880.000.000	3.36	495.102.565	2.06	886.000.000	2.06	281.800.000	0.19	30.883.000	0.19	52.840.282	0.09	52.653.512	0.8	13.684.760	0	160.061.544	9.22	53.26	3.55	496.102.565	172.33	57.69	
3.30.04.2.01.		Memastikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	1	290.000.000	2	147.991.684	1	180.000.000	1	81.000.000	1	0	1	10.740.132	1	21.958.333	1	8.976.333	1	47.871.798	100.00	52.39	3	147.991.684	300.00	59.20	
3.30.04.2.01.03.		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	250.000.000	2	147.991.684	1	150.000.000	1	81.000.000	1	0	1	10.740.132	1	21.955.333	1	8.976.333	1	47.673.798	100.00	52.39	3	147.991.684	300.00	59.20	Rec sar Dit
3.30.04.2.02.		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	1	450.000.000	2	307.240.968	1	406.000.000	1	173.026.000	1	30.883.000	1	42.100.150	1	33.696.300	1	4.193.000	1	100.772.460	100.00	68.24	3	307.240.968	300.00	68.26	
3.30.04.2.02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	200.000.000	24	276.862.008	12	150.000.000	12	110.025.000	3	25.383.000	3	32.214.200	3	23.596.300	3	4.193.000	6	86.386.500	50.00	78.52	30	276.862.008	250.00	138.49	Rec sar Dit
3.30.04.2.03.03.		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	250.000.000	2	30.758.850	1	256.000.000	1	53.000.000	1	4.500.000	0	9.885.950	1	0	0	0	1	14.385.950	100.00	22.83	3	30.758.850	300.00	12.10	
3.30.04.2.03.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	Persen	47	160.000.000	100	40.869.923	47	130.000.000	47	17.778.000	93.26	0	93.26	0	93.23	1.101.679	93.23	616.417	93	1.617.295	108.40	9.10	193.26	40.869.923	411.17	25.94	
3.30.04.2.03.01.		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Petanian	Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas Dokumen Petanian	Dokumen	1	80.000.000	0	1	55.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.04.2.03.03.		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	80.000.000	2	40.869.923	1	65.000.000	1	17.775.000	1	0	1	0	1	101.679	1	51.547	1	1.617.295	100.00	9.10	3	40.869.923	300.00	51.05	Rec sar bul
3.30.06.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Persen	0.71	400.000.000	6.54	407.727.194	0.71	406.074.983	0.71	287.525.000	0	3.734.750	4.71	142.641.872	0	52.658.900	0	0	5	198.885.522	663.38	69.17	11.25	407.727.194	1.584.91	101.93	
3.30.06.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdaftar pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2	400.000.000	5	407.727.194	2	406.074.983	2	287.525.000	0	3.734.750	6	142.641.872	2	52.658.900	2	0	6	199.885.522	300.00	69.17	11	407.727.194	550.00	101.93	
3.30.06.2.01.02.		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku usaha	1	250.000.000	16	407.727.194	1	250.000.000	1	287.525.000	0	3.734.750	1	142.641.872	8	52.658.900	2	0	1	198.885.522	100.00	69.17	17	407.727.194	1.700.00	163.06	Rec sar Dit
3.30.06.2.01.05.		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	2	150.000.000	0	2	156.074.983	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencstra PD pada Tahun 2023 s/d 2026 (pewilco rencstra PD)		Realisasi capaian kinerja Rencstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direalisasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang direalisasi (%)		Realisasi Kinerja Rencstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Rencstra PD s/d Tahun 2024									
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=8+12	15=14/5x100															
1	2	3	4		4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp							
3.30.07.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Persen	61		286,000,000	100	38,481,815	61	150,000,000	61	78,280,000	71.14	903,124	71.14	2,709,372	28.57	1,806,252	66.67	30,033,067	71	35,451,815	118.82	47.11	17.14	35,451,815	280.86	14.18	
3.30.07.2.01.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2		256,000,000	7	35,451,815	2	150,000,000	2	75,250,000	0	903,124	2	2,709,372	2	1,806,252	2	30,033,067	2	35,451,815	100.00	47.11	9	35,451,815	450.00	14.18	
3.30.07.2.01.05.		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1		100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.30.07.2.01.06.		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kembaran dengan website, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	1		150,000,000	0	35,451,815	1	150,000,000	1	75,250,000	0	903,124	1	2,709,372	3	1,806,252	3	30,033,067	1	35,451,815	100.00	47.11	1	35,451,815	100.00	23.63	Ren sor Bul
3.31.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																												
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan UKJP	Nilai	77.50		20,000,000	100	11,637,966	77.50	20,000,000	77.50	5,500,000	70.45	5,328,966	70.45	0	70.42	0	70.42	0	70	5,328,966	80.90	98.89	170.45	11,637,966	215.84	88.19	
3.31.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75		20,000,000	100	11,637,966	75	20,000,000	75	5,500,000	84.62	5,328,966	84.62	0	84.62	0	84.62	0	85	5,328,966	112.83	98.89	184.82	11,637,966	246.18	58.19	
3.31.01.2.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2		20,000,000	8	11,637,966	2	20,000,000	2	5,500,000	3	5,328,966	0	0	0	0	0	3	5,328,966	100.00	95.89	9	11,637,966	450.00	59.10		
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85		6,805,490,000	100	7,842,285,952	85	7,140,415,917	85	7,650,851,610	85	1,707,531,123	85	1,911,887,332	84.62	1,505,545,337	84.62	1,123,553,882	85	6,248,537,674	100.00	81.67	185	7,842,285,952	217.85	116.79	
3.31.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1		5,127,490,000	2	5,278,136,871	1	4,992,490,000	1	5,701,746,010	1	1,911,509,101	1	1,578,404,596	1	1,203,533,302	1	984,690,872	1	5,278,136,871	100.00	92.57	3	5,278,136,871	300.00	102.94	
3.31.01.2.02.01.		Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetapi Oaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31		5/2/490,000	92	5,278,136,871	31	4,992,490,000	31	5,701,746,010	31	1,911,509,101	31	1,578,404,596	31	1,203,533,302	31	984,690,872	31	5,278,136,871	100.00	92.57	93	5,278,136,871	300.00	102.94	
3.31.01.2.03.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95		60,000,000		0	95	60,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.31.01.2.03.01.		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2		60,000,000		0	2	60,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.31.01.2.04.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	75		25,000,000	100	229,358,050	75	25,000,000	75	81,600,000	75	13,038,800	75	16,572,000	100	21,483,000	100	7,575,050	75	57,649,450	100.00	70.74	175	229,358,050	233.33	917.43	
3.31.01.2.04.02.		Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1		25,000,000	2	229,358,050	1	25,000,000	1	81,600,000	1	13,038,800	1	16,572,000	1	21,483,000	1	7,575,050	1	57,649,450	100.00	70.74	3	229,358,050	300.00	917.43	
3.31.01.2.04.03.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75		450,000,000	100	721,255,518	75	450,000,000	75	622,100,000	25	49,279,769	50	87,271,061	100	127,010,988	100	3,249,850	50	265,811,609	66.67	42.89	150	721,255,518	200.00	158.97	
3.31.01.2.04.03.01.		Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1		10,000,000	2	20,303,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	1,486,000	1	2,325,000	1	3,705,000	1	0	1	7,575,000	100.00	50.53	3	20,303,000	300.00	203.01	
3.31.01.2.04.03.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1		15,000,000	2	21,573,300	1	15,000,000	1	12,000,000	1	1,455,000	1	4,330,000	1	1,966,000	1	0	1	7,746,000	100.00	64.95	3	21,573,300	300.00	170.48	
3.31.01.2.04.03.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang disediakan	Paket	1		25,000,000	2	66,636,150	1	25,000,000	1	66,000,000	1	2,999,200	1	7,891,600	1	12,799,550	1	1,249,850	1	25,040,200	100.00	37.84	3	66,636,150	300.00	266.95	
3.31.01.2.04.03.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Dokumen	1		10,000,000	2	20,850,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	13,000,000	1	2,955,000	1	1,850,000	1	2,000,000	1	8,100,000	100.00	81.00	3	20,850,000	300.00	208.50	
3.31.01.2.04.03.08.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	25		370,000,000	100	597,899,068	25	370,000,000	25	519,100,000	35	42,041,580	22	69,874,481	31	105,830,438	130	0	60	286,345,458	240.00	42.08	180	597,899,068	720.00	181.55	
3.31.01.2.04.03.10.		Penatausahaan Aritip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aritip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40		30,000,000		0	40	30,000,000	40	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2023 s/d 2028 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024			
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	85,000,000	100	33,144,948	65	85,925,017	65	87,889,000	0	4,434,724	42.86	4,434,724	42.86	9,600,000	85.71	0	171	18,469,448	263.74	31.91	271.43	33,144,948	417.88	38.99
3.31.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	1	479,925,017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.31.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	45,000,000	0	33,144,948	2	40,000,000	2	57,885,000	0	4,434,724	0	4,434,724	3	9,600,000	0	0	3	18,469,448	150.00	31.91	3	33,144,948	150.00	73.66
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	75	285,000,000	100	109,809,000	75	290,900,000	75	304,800,000	0	0	42.86	59,530,000	42.86	0	85.71	0	43	59,530,000	57.15	19.53	142.86	109,809,000	190.48	41.44
3.31.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	3	240,000,000	0	101,805,000	3	230,000,000	3	279,300,000	0	0	3	59,530,000	0	0	0	3	59,530,000	100.00	21.31	3	109,805,000	100.00	45.75	
3.31.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	0	1	20,000,000	1	25,500,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00
3.31.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	563,000,000	100	1,321,676,775	80	563,000,000	80	614,655,000	80	105,493,180	80	142,836,614	80	118,354,710	80	124,661,952	80	493,346,456	100.00	79.94	180	1,321,676,775	226.00	234.76
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7,000,000	21	62,559,500	1	7,000,000	1	53,975,000	1	7,908,500	1	10,614,250	1	8,007,750	1	8,373,500	1	32,505,000	100.00	60.22	22	62,559,500	2,200.00	893.71
3.31.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Laporan	1	5,000,000	9	612,300	1	5,000,000	1	10,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	612,300	900.00	122.55
3.31.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang Disediakan	Laporan	12	551,000,000	21	1,252,886,775	12	551,000,000	12	550,680,000	3	97,883,880	3	132,322,364	3	110,346,960	3	118,288,452	8	458,846,456	50.00	83.42	27	1,252,889,775	225.00	227.43
3.31.01.2.08.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	220,000,000	100	238,008,710	75	310,000,000	75	268,195,000	75	23,776,558	75	23,836,337	78.57	25,603,337	78.57	3,375,558	75	75,993,790	100.00	28.56	175	238,008,710	233.33	108.59
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	4	70,000,000	24	180,341,950	4	180,000,000	4	179,125,000	1	18,838,558	2	21,318,337	1	18,048,337	1	3,375,558	5	61,800,790	125.00	47.78	29	180,341,950	725.00	229.06
3.31.01.2.08.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	5	27,250,000	5	30,000,000	5	25,000,000	3	49,38,000	4	2,500,000	7	7,655,000	0	0	14	14,993,000	280.00	59.97	19	27,250,000	380.00	90.53
3.31.01.2.08.08.		Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	51,368,800	1	100,000,000	1	114,040,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	2	51,368,800	200.00	102.63
3.31.01.2.08.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	70,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.31.02.		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan industri	Persen	1.61	2,996,718,547	7.14	11,641,048,694	1.61	4,894,410,349	1.61	2,223,760,000	4.76	44,324,847	4.76	476,810,977	4.76	637,666,683	4.76	12,902,107	5	1,171,307,814	299.85	52.67	11.9	11,641,048,694	739.13	368.20
3.31.02.2.01.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya Dokumen PIPK sampai ditetapkan menjadi Perda	Persen	53.00	2,996,718,547	58	11,641,048,694	53.00	4,894,410,349	53.00	2,223,760,000	0	44,324,847	50	476,810,977	50	637,666,683	50	12,902,107	50	1,171,307,814	94.34	52.67	108	11,641,048,694	203.77	368.20
3.31.02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	1,14,480,349	1	87,500,000	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00
3.31.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan Perencanaan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaliran Industri	Jumlah Dokumen Hasil koordinat, Sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan Perencanaan, Pengembangan, Penyebaran dan Penyaliran Industri	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.31.02.2.01.05.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil koordinat, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	207,000,000	1	11,641,048,694	1	3,030,000,000	1	2,195,250,000	0	44,324,847	0	476,810,977	0	637,666,683	1	12,902,107	1	1,171,307,814	100.00	54.83	2	11,641,048,694	200.00	562.37
3.31.02.2.01.06.		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	628,718,547	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.31.03.		PROGRAM PENSIANGAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) KeSI dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Persen	57	108,000,000	0	10,447,300	57	108,000,000	57	88,378,000	43.25	200,000	43.25	6,150,000	0	3,897,300	100	200,000	43	10,447,300	76.88	15.28	43.25	10,447,300	76.88	10.46

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang divaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang divaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang divaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		i					
					5		6		7				8				12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=9+12		15=14/5x100							
					4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp	Renja	k	Rp	DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp	k	Rp	k	Rp
3.31.03.2.01.		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izn yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izn	15	100.000.000	0	10.447.300	15	100.000.000	15	88.376.000	88	200.000	0	6.160.000	40	3.697.300	61	200.000	58	10.447.300	386.67	18.28	58	10.447.300	386.67	10.46		
3.31.03.2.03.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Peraturan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	-Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Peraturan Berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri Menengah yang berfokus di satu kota/kota sepanjang memajukan Penerapan Model Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang mempadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100.000.000			0	1	50.000.000	1		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.31.03.2.04.04.		Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan patutan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIIN) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan patutan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIIIN yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penerapan Model Dalam Negeri (PNIDN) dengan skala usaha Industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang mempadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0		0	10.447.300	0	55.000.000	0	68.375.000	1	200.000	0	6.160.000	1	3.697.300	1	200.000	1	10.447.300	0	18.28	1	10.447.300	0	0	0	0
3.31.04.		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIIIN	Persen	26.50	300.000.000	8.18	14.218.759	26.80	300.000.000	26.50	23.090.000	12.36	384.836	0	1.777.254	20.16	6.777.254	32.72	384.836	12	9.324.180	48.60	40.38	20.63	14.218.759	77.47	4.74		
3.31.04.2.01.		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	Database	1	300.000.000	2	14.218.759	1	300.000.000	1	23.090.000	1	384.836	1	1.777.254	1	6.777.254	1	384.836	1	9.324.180	100.00	40.38	3	14.218.759	300.00	4.74		
3.31.04.2.01.01.		fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Ungkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIIN)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Ungkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIIN)	Dokumen	1	230.000.000	1	14.218.759	1	230.000.000	1	23.090.000	1	384.836	1	1.777.254	1	6.777.254	1	384.836	1	9.324.180	100.00	40.38	2	14.218.759	200.00	6.18	Rec sor Des	
3.31.04.2.01.02.		Dieminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIIN	Jumlah Dokumen Hasil Dieminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIIN	Dokumen	1	70.000.000			0	1	70.000.000	1		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																												
3.30.06.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP Berstandar Terakreditasi yang berlaku	Persen	68.42	350.000.000	44.72	523.974.234	68.42	350.000.000	68.42	276.630.000	0	3.727.500	97.89	68.942.750	43.8	45.673.250	66.89	44.003.107	98	162.546.607	84.61	68.34	102.61	523.974.234	146.97	149.71		
3.30.06.2.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	Persen	24	350.000.000	56.71	523.974.234	24	350.000.000	24	276.630.000	0	3.727.500	9.38	68.942.750	39.8	45.673.250	39.8	44.003.107	8	162.546.607	34.92	68.34	95.09	523.974.234	271.21	149.71		
3.30.06.2.01.01.		Pelaksanaan Metrologi legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Alat Timbangan, dan Alat Pengalangan Dinamo Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takat, Alat Timbangan, dan Alat Pengalangan Dinamo Ulang	Unit	255	260.000.000	438	523.974.234	255	305.000.000	255	276.630.000	0	3.727.500	99	68.942.750	122	45.673.250	187	44.003.107	406	162.546.607	160.00	58.34	644	523.974.234	330.98	209.59	Rec sor Des	
3.30.06.2.01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal yang Ditina	Jumlah Petaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Ditina	Orang	20	100.000.000			0	20	80.000.000	20		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 14 indikator program, 23 Indikator Kegiatan dan 38 Indikator Sub Kegiatan yang ditargetkan dalam Renja tahun 2024, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Realisasi					Target Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan (%)	22.97	19.50	55.94	35.54	-	-	54.67
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan (%)	13.04	57.69	60.00	60.00	-	-	25.00
	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM (%)	6.67	4.50	8.84	27.08	-	-	17.50
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	33.95	49.54	52.54	49.87	-	-	60.09
	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital (%)	23.81	8.33	28.46	33.33	-	-	35.71
Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Lakip (Nilai)	76.68	77.45	62.00	70.42	-	-	80.00
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	3.46				-	-	3.50

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM belum terpadu dan optimal;
 2. Program dan kegiatan belum sinkron dan terintegrasi disebabkan oleh proses perencanaan yang kurang matang dan kurangnya komitmen serta konsisten pada RPJMD dan Renstra sehingga kurang terarah dan terencana;
 3. Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan;
 4. Kemampuan SDM aparatur masih relatif rendah;
 5. Pemahaman dan tanggungjawab terhadap job description masih kurang;
 6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan UMKM.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut meliputi:
 - 1) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tantangan untuk memecahkan isu-isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat secara pesat;

- b. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berubah-ubah;
 - c. Letak geografis yang sulit dijangkau;
 - d. Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat masih rendah;
 - e. Kualitas jiwa kewirausahaan masih relatif rendah;
 - f. Minat untuk berkoperasi masih rendah;
 - g. Masih lemahnya daya saing dan pemasaran produk daerah;
 - h. Masih rendahnya tingkat pengembalian dana bergulir;
 - i. Rendahnya kepercayaan masyarakat umumnya dan anggota Koperasi khususnya terhadap kepengurusan Koperasi yang ada terutama KUD.
 - j. Belum semua Koperasi yang melaksanakan RAT sebagaimana yang di atur dalam anggaran dasar;
 - k. Banyaknya Koperasi yang tidak aktif;
 - l. Banyaknya usaha mikro yang berpindah-pindah sehingga sulit dilakukan monitoring dan pembinaan.
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
- 4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro untuk menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global.
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
 - 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.

- 3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
 - 4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.
- Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
 - b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tidak terlepas dari pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yakni:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

F. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten / kota

G. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

H. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

I. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

J. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

K. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

L. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

M. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

N. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil dan menengah,
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan,
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel,
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima,
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.

Tabel Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal (2021)	Target 2026	Kondisi Akhir (2026)
Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil dan menengah	Persentase kenaikan industri kecil menengah	4,36	4,86	4,86
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor	1.092.030	1.191.030	1.191.030
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	76,68	80,00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik	3,44	4,5	4,5
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase informasi publik yang disebarluaskan	0,00	71,00	71,00

Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna adalah :

1. Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri,
2. Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri,
3. Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri,
4. Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi,
5. Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro,
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Tabel Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target 2025	Kondisi Akhir (2026)
Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase penambahan industri rumah tangga dan olahan	22,97	54,67	54,67
Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	13,04	25,00	25,00
Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	6,67	17,50	17,50
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	33.95	60.09	60.09
Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	23,81	35,71	35,71
Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Lakip	76,68	80,00	80,00
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	3,46	3,50	3,50

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026
- Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2026 tertuang dalam Tabel berikut ini :

(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027).

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO						24.980.958.547,00							25.533.968.547,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.983.528.600,00							4.520.750.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						3.983.528.600,00							4.520.750.000,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASEPEMERIKSA AN DANPENGAWASAN UNTUKKOPERASI	-			16.88 Persen	149.823.500,00						-	150.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasiberdasarkan kualitasRAT, volume usaha danasset	-			12.84 Persen	149.823.500,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				28 Unit Usaha	74.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				15 Unit Usaha	74.923.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASEKOPERASI/ SEHAT	-			30.51 Persen	249.893.000,00						-	250.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yangdiberi Penghargaan	-			2 Koperasi	249.893.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				11 Unit Usaha	149.893.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				2 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE JUMLAHANGGOTA KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN	-			0 Persen	199.991.500,00						-	200.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	-			22 Koperasi	199.991.500,00		-	-	-		-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				22 Orang	199.991.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTA SEKOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DANUSAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM AERAH KABUPATEN/KOTA	-			18,13 Persen	249.745.500,00						-	400.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	-			6 Koperasi	249.745.500,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit Usaha	249.745.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO MENJADI WIRUSAHA	-			5,85 Persen	2.759.108.100,00						-	2.670.750.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online(ODS)	-			3194 umkm	2.759.108.100,00			-	-	-	-	2.670.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				2 Unit Usaha	2.018.358.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.970.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2 Unit Usaha	345.856.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				2 Orang	149.410.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	245.482.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI STANDARISASI	-			52,30 Persen	374.967.000,00						-	850.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	-			296 umkm	374.967.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				4 Unit Usaha	374.967.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						20.997.429.947,00							21.013.208.547,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6.944.269.050,00							6.070.000.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN	-			2,37 Persen	468.168.700,00						-	425.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	-			13,45 Persen	99.838.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	99.838.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	-			83 Persen	99.816.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	99.816.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah pelaku usahayang memiliki surat izinper dagangan minuman beralkohol golongan Bdan C	-			4 Pelaku Usaha	69.980.700,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	69.980.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usahayang memperoleh Izin	-			4 Pelaku Usaha	148.534.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	54.814.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	93.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA tepat waktu	-			84 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-			25,00 Persen	4.746.855.000,00						-	3.965.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	-			1 Gedung	4.530.610.000,00			-	Optimalisasi i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	3.540.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	4.182.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		2.660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	348.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	-			1 Kegiatan	216.245.000,00			-	Optimalisasi i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	116.249.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	99.995.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU	-			2.09 Persen	929.600.970,00						-	930.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	-			1 Laporan	319.762.270,00			-	-	-	-	320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	69.912.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	249.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hargadan Stok Barang Pokokdan Barang Penting	-			1 Laporan	449.852.700,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	199.896.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	249.955.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisidayang disalurkan	-			53 Persen	159.986.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	79.986.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	-			0.73 Persen	599.664.200,00						-	550.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	-			2 Produk	599.664.200,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1 Pelaku Usaha	249.887.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				3 Pelaku Usaha	149.823.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	199.953.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI	-			63 Persen	199.980.180,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	-			2 Produk	199.980.180,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15 Orang	49.991.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	99.990.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				1 UMKM	49.999.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						14.053.160.897,00							14.943.208.547,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			78.50 Nilai	7.637.873.997,00						-	7.803.490.000,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	5.374.244.809,00			-	-	-	-	5.127.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	5.374.244.809,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.127.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dserah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	-			95 Persen	114.919.888,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	54.919.888,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	-			95 Persen	484.949.500,00			-	-	-	-	458.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.996.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.966.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	369.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	858.849.900,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	369.014.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	39.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	229.999.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			80 Persen	561.440.700,00			-	-	-	-	563.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.992.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	549.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusanper kantoran	-			75 Persen	223.469.200,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	69.973.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	33.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.796.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-			1.65 Persen	5.968.171.370,00						-	6.689.718.547,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai ditetapkannya menjadi Perda	-			55 Persen	5.968.171.370,00			-	-	-	-	6.689.718.547,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	198.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	99.998.670,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	269.964.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		570.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	5.399.578.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.819.718.547,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN	-			64 Persen	99.944.450,00						-	100.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan	-			25 izin	99.944.450,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	99.944.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DALAM SIINAS	-			39,75 Persen	347.171.080,00						-	350.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	-			1 Data Base	347.171.080,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	229.992.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	67.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	49.878.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			J U M L A H					24.980.958.547,00							25.533.958.547,00	

Kab. Natuna, 05 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kesehatan Kab. Natuna



MARWAN SJAHPUTRA, S. TP
NIP. 19700901 200212 1 007

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2026 ini, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 26 Desember 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NATUNA



MARWAN SJAH PUTRA, S.TP

Pembina Tk. I

NIP. 19700901 200212 1 007